Available Online at https://journal.umgo.ac.id/index.php/JPPE Vol. 9 No (1), Tahun 2026
ISSN 2622-349X

PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN GORONTALO

Aip Pratikto Hunowu[1], Joice Machmud[2], Sri Hantuti Paramata[3]
[1,2,3)]Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Abstract

This study aims to determine the influence of regional fiscal policy on the economic growth of Gorontalo Regency. Fiscal policy in this study is measured through Regional Original Revenue (PAD) and Capital Expenditure. The type of research used is quantitative research using secondary data during the period 2015–2025. The data analysis technique uses multiple linear regression to determine the influence of each variable and its influence together on economic growth. The results of the study show that PAD has a positive relationship direction, but it has no significant effect on economic growth with a significance value of 0.425. Capital Expenditure also shows a positive relationship direction, but not significantly with a significance value of 0.947. Simultaneously, PAD and Capital Expenditure have no significant effect on the economic growth of Gorontalo Regency, with an F value of 0.455 and a significance of 0.650. The value of the determination coefficient of 0.102 shows that both variables explain the 10.2% variation in economic growth. The results of this study show that the increase in regional revenue and capital expenditure has not shown a statistically significant influence on the economic growth of Gorontalo Regency during the study period.

Keywords: *Economic Growth, Capital Expenditure, Fiscal Policy, Regional Original Revenue*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan fiskal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo. Kebijakan fiskal dalam penelitian ini diukur melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder selama periode 2015–2025. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel maupun pengaruhnya secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD memiliki arah hubungan positif, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikansi sebesar 0,425. Belanja Modal juga menunjukkan arah hubungan positif, tetapi tidak signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,947. Secara simultan, PAD dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo, dengan nilai F sebesar 0,455 dan signifikansi sebesar 0,650. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,102 menunjukkan bahwa kedua variabel menjelaskan 10,2% variasi pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan daerah dan Belanja Modal belum memperlihatkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo selama periode penelitian.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi

Received: 04 Mei 2026 *Revised: 05 Mei 2026* *Accepted: 06 Mei 2026*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah karena mencerminkan perkembangan aktivitas produksi barang dan jasa serta kemampuan perekonomian dalam menciptakan nilai tambah. Dalam konteks pembangunan regional, pertumbuhan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga dengan kapasitas suatu daerah dalam memanfaatkan sumber daya, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Solow (1956) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi, sedangkan Romer (1990) menekankan peranan investasi, pengetahuan, dan inovasi dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang. Kedua pandangan tersebut memperlihatkan bahwa ketersediaan sumber daya ekonomi perlu didukung oleh kebijakan yang mampu meningkatkan produktivitas dan memperkuat kapasitas pembangunan secara berkelanjutan.

Salah satu instrumen yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah kebijakan fiskal. Melalui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah memiliki ruang untuk menyediakan pelayanan publik, membangun infrastruktur, serta menciptakan kondisi yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam perspektif desentralisasi fiskal, Oates (1972) menjelaskan bahwa pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah memungkinkan penyediaan barang dan pelayanan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Oates (1999) selanjutnya menegaskan pentingnya efisiensi alokasi sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdesentralisasi. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan fiskal daerah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran, tetapi juga perlu dilihat dari kemampuan pemerintah dalam mengarahkan sumber daya fiskal untuk menghasilkan manfaat pembangunan.

Dalam penelitian ini, kebijakan fiskal daerah direpresentasikan melalui dua instrumen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator sisi penerimaan dan Belanja Modal sebagai indikator sisi pengeluaran. PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan dari sumber-sumber yang menjadi kewenangannya, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Semakin besar kapasitas penerimaan yang dimiliki, semakin luas pula peluang pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan sesuai dengan prioritas wilayahnya. Namun, peningkatan PAD belum tentu secara langsung diikuti oleh pertumbuhan ekonomi apabila tambahan penerimaan tersebut tidak

didukung oleh pengelolaan dan penggunaan anggaran yang efektif. Halim (2020) menempatkan kapasitas keuangan daerah sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah, sedangkan Badrudin dan Kuncorojati (2017) memberikan dasar empiris mengenai keterkaitan penerimaan daerah dan pertumbuhan ekonomi dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia.

Keterkaitan antara sumber penerimaan daerah dan kapasitas fiskal juga menjadi perhatian penelitian Lamangida et al. (2019) yang mengkaji pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Gorontalo. Kajian tersebut relevan karena menempatkan pajak daerah sebagai salah satu sumber pembentukan PAD dalam konteks wilayah Gorontalo. Meskipun penelitian tersebut tidak secara langsung menguji pertumbuhan ekonomi, pembahasannya memperkuat alasan untuk memperhatikan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber penerimaan sebagai bagian dari kebijakan fiskal. Pada tingkat kabupaten, persoalannya menjadi lebih luas karena kapasitas PAD perlu dihubungkan dengan struktur perekonomian, kebutuhan pembiayaan pembangunan, dan kemampuan pemerintah mengalokasikan anggaran secara produktif. Oleh sebab itu, hubungan antara PAD dan pertumbuhan ekonomi memerlukan pengujian empiris berdasarkan kondisi daerah yang diteliti.

Pada sisi pengeluaran, Belanja Modal merupakan komponen APBD yang digunakan untuk memperoleh atau membentuk aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal dapat mendukung pembangunan jalan, jembatan, jaringan irigasi, fasilitas pendidikan, sarana kesehatan, serta infrastruktur publik lain yang diperlukan masyarakat dan dunia usaha. Dalam teori keuangan publik, Musgrave (1959) menjelaskan bahwa pemerintah menjalankan fungsi alokasi melalui penyediaan barang dan pelayanan publik yang tidak selalu dapat disediakan secara memadai oleh mekanisme pasar. Mahmudi (2019) juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan sektor publik yang berorientasi pada efektivitas dan manfaat penggunaan anggaran. Namun demikian, manfaat ekonomi dari Belanja Modal tidak selalu muncul pada tahun ketika anggaran direalisasikan. Infrastruktur memerlukan waktu untuk diselesaikan dan dimanfaatkan, sedangkan kontribusinya terhadap produktivitas bergantung pada ketepatan perencanaan, kualitas pelaksanaan, dan kesesuaian proyek dengan kebutuhan perekonomian daerah.

Pentingnya orientasi penggunaan anggaran pembangunan dapat dilihat dalam penelitian Machmud et al. (2023) mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa dalam menunjang pembangunan di Desa Karyamukti, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai hubungan antara pengalokasian sumber daya keuangan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan pada tingkat lokal. Selanjutnya, Ongi et al. (2025) mengkaji efektivitas Dana Desa tahun 2017–2021 dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Totopo,

Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo. Kedua penelitian tersebut memiliki cakupan keuangan desa sehingga tidak dapat disamakan secara langsung dengan Belanja Modal APBD kabupaten. Meskipun demikian, keduanya memberikan konteks empiris mengenai pentingnya penggunaan anggaran, prioritas pembangunan, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Perspektif ini menjadi relevan ketika Belanja Modal diposisikan sebagai instrumen fiskal yang diharapkan mendukung aktivitas ekonomi Kabupaten Gorontalo.

Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu daerah di Provinsi Gorontalo yang perekonomiannya memiliki keterkaitan kuat dengan kegiatan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Karakteristik tersebut menyebabkan perkembangan ekonomi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh produktivitas sektor primer, kondisi iklim, harga komoditas, investasi, dan permintaan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo (2026), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo pada tahun 2025 mencapai 5,35%, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 4,11%. Meskipun terjadi peningkatan pada akhir periode pengamatan, perkembangan pertumbuhan ekonomi selama 2015–2025 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan perubahan kondisi perekonomian daerah. Periode tersebut juga mencakup masa sebelum pandemi Covid-19, perlambatan aktivitas ekonomi pada masa pandemi, serta proses pemulihan setelahnya. Perbedaan kondisi antartahun ini perlu diperhatikan dalam menilai hubungan antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi.

Dinamika perekonomian Kabupaten Gorontalo berlangsung bersamaan dengan perubahan kapasitas penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Berdasarkan data realisasi keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian, PAD menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi selama periode 2015–2025. Pada saat yang sama, Belanja Modal mengalami perubahan yang cukup besar, dengan realisasi mencapai Rp353,57 miliar pada tahun 2021 dan Rp100,33 miliar pada tahun 2025. Perubahan tersebut memperlihatkan adanya dinamika prioritas pengeluaran pembangunan, sementara pertumbuhan ekonomi tidak selalu bergerak searah dengan besarnya penerimaan maupun Belanja Modal pada tahun yang sama. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peningkatan kapasitas fiskal dan realisasi pengeluaran pembangunan berkaitan dengan perubahan pertumbuhan ekonomi. Hubungan tersebut tidak dapat disimpulkan hanya melalui perbandingan perkembangan anggaran dan pertumbuhan, sehingga diperlukan pengujian statistik untuk memperoleh gambaran empiris yang lebih terukur.

Penelitian terdahulu telah memberikan perhatian terhadap hubungan instrumen fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi. Badrudin dan Kuncorojati (2017) mengkaji penerimaan daerah dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Putra dan Yasa (2019) meneliti hubungan PAD, Belanja Modal, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran di Provinsi Bali.

Selanjutnya, Saputra et al. (2021) membahas keterkaitan Belanja Modal, kapasitas fiskal, dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan Tuwo et al. (2021) mengkaji pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa. Makawaehe et al. (2023) juga membahas hubungan PAD, Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara penerimaan, pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi merupakan persoalan penting dalam ekonomi regional. Namun, perbedaan karakteristik ekonomi, struktur anggaran, dan kondisi pembangunan antarwilayah mengharuskan hasil penelitian terdahulu ditafsirkan sesuai dengan konteks masing-masing daerah.

Berdasarkan kajian tersebut, masih diperlukan bukti empiris yang secara khusus menjelaskan hubungan PAD dan Belanja Modal dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo sepanjang periode 2015–2025. Kebutuhan penelitian ini tidak semata-mata didasarkan pada perbedaan lokasi atau penambahan tahun pengamatan, tetapi juga pada pentingnya menilai dua sisi kebijakan fiskal secara bersamaan dalam kondisi ekonomi yang mengalami perubahan. Di satu sisi, PAD mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam menghimpun sumber pembiayaan. Di sisi lain, Belanja Modal menunjukkan penggunaan sebagian sumber daya fiskal untuk membentuk aset pembangunan. Keduanya memiliki mekanisme yang berbeda dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi, sehingga peningkatan nilai anggaran tidak dapat langsung diartikan sebagai peningkatan efektivitas kebijakan. Dari perspektif tersebut, penelitian ini berupaya memberikan gambaran mengenai apakah perubahan kedua instrumen fiskal tersebut memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengujian empiris yang menghubungkan sisi penerimaan dan sisi pengeluaran fiskal daerah dalam satu model analisis pada Kabupaten Gorontalo. Penggunaan data tahunan selama 2015–2025 memungkinkan pengamatan terhadap hubungan fiskal dan pertumbuhan ekonomi dalam periode yang mencakup perubahan kondisi ekonomi sebelum, selama, dan setelah pandemi, meskipun jumlah observasi yang terbatas perlu diperhatikan dalam penafsiran hasil. Penelitian ini tidak menempatkan besarnya PAD maupun Belanja Modal sebagai jaminan terjadinya pertumbuhan ekonomi, melainkan menguji hubungan keduanya berdasarkan data aktual. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat memperkaya pembahasan mengenai kapasitas fiskal, efektivitas pengeluaran pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo, menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo, serta menguji pengaruh PAD dan Belanja Modal secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi selama periode

2015–2025. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan empiris bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan, meningkatkan kualitas alokasi Belanja Modal, dan memperkuat orientasi kebijakan fiskal pada pembangunan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo. Pendekatan ini digunakan untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik melalui regresi linear berganda (Creswell & Creswell, 2018; Wooldridge, 2020). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo dengan periode pengamatan 2015–2025. Data yang digunakan merupakan data sekunder tahunan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Seluruh data tahunan selama periode penelitian digunakan sehingga diperoleh 11 observasi (N = 11).

Variabel penelitian meliputi PAD (X_1) dan Belanja Modal (X_2) sebagai variabel independen serta pertumbuhan ekonomi (Y) sebagai variabel dependen. PAD dan Belanja Modal diukur berdasarkan nilai realisasi tahunan dalam satuan miliar rupiah, sedangkan pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan persentase perubahan PDRB atas dasar harga konstan dibandingkan tahun sebelumnya. Penggunaan data realisasi mencerminkan pelaksanaan kebijakan fiskal daerah, sementara PDRB harga konstan menggambarkan perubahan output ekonomi riil (Musgrave, 1959; Solow, 1956). Pertumbuhan ekonomi dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$PEt = \frac{PDRBt - PDRBt-1}{PDRBt-1} X\,100\,\%$$

Keterangan: PEt merupakan pertumbuhan ekonomi tahun ke-t, PDRBt merupakan PDRB atas dasar harga konstan tahun berjalan, dan PDRBt-1 merupakan PDRB tahun sebelumnya.

Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Model regresi digunakan untuk mengestimasi hubungan PAD dan Belanja Modal dengan pertumbuhan ekonomi, baik secara parsial maupun simultan. Persamaan regresi dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan: Y_t merupakan pertumbuhan ekonomi; α adalah konstanta; β_1 dan β_2 merupakan koefisien regresi; X_{1t} adalah PAD; X_{2t} adalah Belanja Modal; dan ε_t merupakan komponen galat. Analisis diawali dengan statistik deskriptif, dilanjutkan dengan pemeriksaan asumsi regresi serta pengujian hipotesis menggunakan uji t untuk pengaruh parsial dan uji F untuk pengaruh simultan. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur proporsi variasi pertumbuhan ekonomi yang dapat

dijelaskan oleh kedua variabel independen (Gujarati & Porter, 2009; Wooldridge, 2020).

Pengujian hipotesis menggunakan tingkat signifikansi 5% (α = 0,05), dengan nilai p < 0,05 sebagai dasar penolakan hipotesis nol. Mengingat penelitian hanya menggunakan 11 observasi tahunan, interpretasi hasil mempertimbangkan keterbatasan ukuran sampel, potensi autokorelasi, dan karakteristik data runtut waktu. Oleh karena itu, hasil analisis digunakan untuk menjelaskan hubungan statistik antara PAD, Belanja Modal, dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo selama periode 2015–2025, tanpa menyimpulkan hubungan kausal secara definitif (Gujarati & Porter, 2009; Wooldridge, 2020).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo selama periode 2015–2025 mengalami fluktuasi. PAD memiliki nilai minimum Rp113,22 miliar dan maksimum Rp190,43 miliar, dengan rata-rata Rp146,49 miliar. Belanja Modal menunjukkan variasi lebih besar, yakni antara Rp100,33 miliar hingga Rp353,57 miliar, dengan rata-rata Rp213,47 miliar. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi berkisar antara -0,01% hingga 6,78%, dengan rata-rata 4,79%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah tidak selalu diikuti oleh pertumbuhan ekonomi dengan arah dan besaran yang sebanding.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11	113,22	190,43	146,4918	26,57480
Belanja Modal	11	100,33	353,57	213,4664	74,57068
Pertumbuhan Ekonomi	11	-0,01	6,78	4,7873	2,10910

Sumber: Data sekunder BPS dan DJPK, diolah menggunakan SPSS.

Perkembangan tersebut terlihat dari penurunan Belanja Modal sebesar Rp353,57 miliar pada 2021 menjadi Rp100,33 miliar pada 2025, sementara pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,11% pada 2024 menjadi 5,35% pada 2025. Perbedaan pola tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan besarnya pengeluaran pemerintah, tetapi juga dengan aktivitas sektor produktif, investasi, konsumsi, dan produktivitas ekonomi. Solow (1956) menekankan pentingnya akumulasi modal dalam pertumbuhan ekonomi, sedangkan Romer (1990) menjelaskan peran produktivitas dan kemajuan pengetahuan dalam mendorong pertumbuhan jangka panjang. Dengan demikian, peningkatan kapasitas fiskal perlu didukung oleh pemanfaatan sumber daya yang produktif agar berpotensi memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa PAD memiliki koefisien regresi positif dengan nilai signifikansi 0,425 > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa PAD belum terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Gorontalo selama periode 2015–2025. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan daerah tidak selalu berkaitan langsung dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif desentralisasi fiskal, Oates (1972, 1999) menjelaskan bahwa kewenangan fiskal daerah dapat meningkatkan kesesuaian pelayanan publik dengan kebutuhan masyarakat. Namun, manfaat ekonomi dari kewenangan tersebut bergantung pada kemampuan pemerintah mengalokasikan dan mengelola sumber daya secara efektif.

Temuan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Lamangida et al. (2019) yang mengkaji kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kota Gorontalo. Meskipun memiliki fokus berbeda, penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai pentingnya optimalisasi sumber penerimaan daerah. Sementara itu, Sako dan Lantowa (2018) menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Kedua penelitian tersebut memberikan perspektif bahwa peningkatan kapasitas fiskal perlu didukung oleh kualitas tata kelola keuangan. Namun, kontribusi penerimaan dan kualitas pelaporan tidak secara langsung membuktikan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Tidak signifikannya PAD dapat berkaitan dengan ketergantungan daerah pada sumber pendapatan lain, efektivitas pengalokasian anggaran, serta kemungkinan adanya jeda waktu antara penerimaan dan manfaat ekonomi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh aktivitas sektor-sektor produksi yang tidak seluruhnya tercermin dalam perubahan PAD. Penjelasan tersebut masih bersifat interpretatif karena belum diuji secara khusus dalam model penelitian. Oleh karena itu, peningkatan PAD perlu diarahkan tidak hanya pada optimalisasi penerimaan, tetapi juga pada penguatan kualitas pengelolaan fiskal untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki koefisien regresi positif dengan nilai signifikansi 0,947 > 0,05. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Belanja Modal belum terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo selama periode penelitian. Secara teoretis, Belanja Modal merupakan instrumen pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan aset publik yang berpotensi meningkatkan kapasitas produksi. Musgrave (1959) menempatkan penyediaan barang publik sebagai fungsi alokasi pemerintah, sedangkan Mahmudi (2019) menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran dalam penilaian kinerja sektor publik. Dengan demikian, manfaat Belanja Modal tidak hanya ditentukan oleh besarnya realisasi, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan dan pemanfaatan aset yang dihasilkan.

Temuan ini dapat dikaitkan secara kontekstual dengan penelitian Machmud et al. (2023) mengenai pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam menunjang pembangunan di Desa Karyamukti serta Ongi et al. (2025) mengenai efektivitas Dana Desa dalam

pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Totopo. Kedua penelitian tersebut menempatkan pengelolaan anggaran sebagai aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan. Baderan dan Napu (2020) juga menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa menghadapi kendala permodalan dan kapasitas pengelolaan. Meskipun berbeda dalam unit analisis dan instrumen fiskal, kajian tersebut memberikan perspektif mengenai pentingnya kapasitas kelembagaan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya pembangunan.

Tidak signifikannya Belanja Modal dapat berkaitan dengan komposisi pengeluaran, kualitas infrastruktur, serta jeda waktu antara pelaksanaan pembangunan dan munculnya manfaat ekonomi. Pengeluaran untuk infrastruktur produktif, misalnya, berpotensi memberikan manfaat yang berbeda dibandingkan pengadaan aset administratif. Namun, penelitian ini belum memisahkan jenis Belanja Modal maupun menguji pengaruh tertundanya. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak bermanfaat, melainkan bahwa hubungan statistiknya dengan pertumbuhan ekonomi belum terbukti signifikan dalam model yang digunakan.

Pengaruh PAD dan Belanja Modal secara Simultan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian simultan menunjukkan nilai F sebesar 0,455 dengan signifikansi 0,650 > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa PAD dan Belanja Modal secara bersama-sama belum terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,102 menunjukkan bahwa kedua variabel mampu menjelaskan 10,2% variasi pertumbuhan ekonomi dalam model, sedangkan 89,8% sisanya tidak dijelaskan oleh model penelitian. Temuan ini memperlihatkan bahwa kemampuan penjelasan model relatif terbatas sehingga diperlukan perhatian terhadap faktor ekonomi lainnya (Gujarati & Porter, 2009; Wooldridge, 2020).

Tabel 2. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian	Arah hubungan	Statistik hasil	Keputusan pada α = 0,05
PAD terhadap pertumbuhan ekonomi	Positif	p = 0,425	Tidak signifikan
Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi	Positif	p = 0,947	Tidak signifikan
PAD dan Belanja Modal secara simultan	Tidak berlaku untuk uji gabungan	F = 0,455; p = 0,650	Tidak signifikan
Koefisien determinasi	Tidak berlaku	R^2 = 0,102	10,2% variasi dijelaskan model

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan SPSS.

Secara teoretis, hasil tersebut sejalan dengan pandangan Solow (1956) dan Romer (1990) bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan akumulasi modal, tenaga kerja, produktivitas, dan kemajuan teknologi. Dalam konteks daerah, Machmud et al. (2019) menekankan pentingnya potensi sektoral dalam memahami perkembangan ekonomi wilayah. Penelitian Putra dan Yasa (2019), Saputra et al. (2021), Tuwo et al. (2021), serta Makawaehe et al. (2023) juga menempatkan instrumen fiskal dalam kajian pertumbuhan ekonomi dan

pembangunan daerah. Namun, perbedaan wilayah, periode, dan variabel penelitian perlu diperhatikan dalam membandingkan hasilnya. Dengan demikian, hubungan antara kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi perlu dipahami berdasarkan karakteristik ekonomi serta efektivitas pengelolaan pembangunan pada masing-masing daerah.

Implikasi Kebijakan dan Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kebijakan fiskal Kabupaten Gorontalo perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD dan efektivitas Belanja Modal, bukan hanya pada pertumbuhan nominal anggaran. Optimalisasi penerimaan perlu disertai pengalokasian anggaran yang mendukung sektor produktif, pembangunan infrastruktur prioritas, dan peningkatan manfaat aset publik. Perspektif Sako dan Lantowa (2018) mengenai kualitas pelaporan keuangan serta Baderan dan Napu (2020) mengenai kapasitas kelembagaan memperkuat pentingnya tata kelola dan pemanfaatan sumber daya dalam pembangunan ekonomi daerah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah observasi yang hanya mencakup sebelas tahun, penggunaan dua variabel independen, serta belum dilakukannya pengujian pengaruh tertunda Belanja Modal. Selain itu, hasil diagnostik regresi belum disajikan sehingga pemenuhan asumsi model runtut waktu belum dapat dipastikan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode pengamatan lebih panjang, menambahkan variabel investasi, tenaga kerja, dan struktur ekonomi, serta mempertimbangkan komposisi Belanja Modal dan pengaruh antarperiode. Pengembangan tersebut diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan Belanja Modal memiliki arah hubungan positif, tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo, baik secara parsial maupun simultan. Temuan tersebut menegaskan pentingnya memperhatikan kualitas pengelolaan penerimaan, efektivitas pengeluaran pembangunan, dan produktivitas pemanfaatan sumber daya fiskal sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal daerah yang diukur melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo selama periode 2015–2025. Secara parsial, PAD memiliki arah hubungan positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,425, sedangkan Belanja Modal juga menunjukkan arah hubungan positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,947. Kedua nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga masing-masing variabel belum terbukti berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara simultan, PAD dan Belanja Modal juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana

ditunjukkan oleh nilai F sebesar 0,455 dengan signifikansi 0,650. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,102 menunjukkan bahwa kedua variabel hanya mampu menjelaskan 10,2% variasi pertumbuhan ekonomi, sedangkan 89,8% lainnya belum dijelaskan oleh model penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas penerimaan dan realisasi Belanja Modal belum tentu berkaitan secara langsung dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan fiskal daerah perlu dipahami tidak hanya berdasarkan besarnya penerimaan dan pengeluaran, tetapi juga melalui kualitas pengelolaan serta pemanfaatannya dalam mendukung kegiatan ekonomi produktif.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Gorontalo disarankan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kebijakan fiskal daerah melalui optimalisasi PAD yang disertai penguatan perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Pengalokasian Belanja Modal perlu lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur dan penyediaan aset publik yang mendukung sektor-sektor produktif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan perekonomian daerah. Selain memperhatikan tingkat realisasi anggaran, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan program serta manfaat ekonomi yang dihasilkan agar kebijakan fiskal lebih berorientasi pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas periode pengamatan dan menambahkan variabel ekonomi lainnya, seperti investasi, tenaga kerja, produktivitas sektoral, dan struktur perekonomian daerah. Penelitian berikutnya juga perlu mempertimbangkan komposisi Belanja Modal, kemungkinan pengaruh tertunda antarperiode, serta pengujian asumsi model runtut waktu secara lebih menyeluruh. Pengembangan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan kebijakan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo. (2024). *Kabupaten Gorontalo dalam angka 2024*. https://gorontalokab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo. (2026). *Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo tahun 2025*.

Baderan, U. S., & Napu, B. (2020). Peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Ayuhula Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public, 3*(2), 66–72. https://doi.org/10.31314/jsap.3.2.66-72.2020

Badrudin, R., & Kuncorojati, I. (2017). The effect of district own-source revenue and balance funds on public welfare by capital expenditure and economic growth as an intervening variable in Special District of Yogyakarta. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 19*(1), 54–59. https://doi.org/10.9744/jmk.19.1.54-59

Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (Eds.). (1998). *Fiscal decentralization in developing countries*. Cambridge University Press.

Canavire-Bacarreza, G., Martinez-Vazquez, J., & Vulovic, V. (2020). Fiscal decentralization and economic growth: An updated review of empirical evidence. In J. Martinez-Vazquez & F. Vaillancourt (Eds.), *Fiscal decentralization and local finance in developing countries*. Edward Elgar Publishing.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). *Portal data APBD pemerintah daerah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. https://djpk.kemenkeu.go.id

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2026). *Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD): Realisasi APBD Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2015–2025*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (Edisi ke-10). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill/Irwin.

Halim, A. (2020). *Manajemen keuangan sektor publik: Problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Salemba Empat.

Lamangida, T., Baderan, U. S., & Saridi, R. R. (2019). Pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Gorontalo. *JPPE: Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi, 2*(2), 81–91.

Machmud, J., Baderan, U. S., & Lasena, I. L. (2019). Analisis potensi ekonomi Kota Gorontalo dengan pendekatan model basis ekonomi. *JPPE: Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi, 2*(1), 63–74. https://journal.umgo.ac.id/index.php/JPPE/article/view/850

Machmud, J., Sako, U., & Lapananda, E. Y. (2023). Penggunaan alokasi dana desa dalam menunjang pembangunan di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *JPPE: Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi, 6*(1), 13–21.

Makawaehe, T. A., Walewangko, E. N., & Sumual, J. I. (2023). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 23*(3), 37–48.

Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2003). Fiscal decentralization and economic growth. *World Development, 31*(9), 1597–1616. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00109-8

Musgrave, R. A. (1959). *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill.

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). McGraw-Hill.

Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.

Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature, 37*(3), 1120–1149. https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120

Ongi, Y., Paramata, S. H., Baderan, U. S., & Machmud, J. (2025). Efektivitas

dana desa tahun 2017–2021 dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa Totopo Kecamatan Bilato Kabupaten Gorontalo. *JPPE: Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi, 8*(1), 37–48.

Putra, I. N. A., & Yasa, I. N. M. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 8*(12), 2836–2865.

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. https://peraturan.bpk.go.id

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. https://peraturan.bpk.go.id

Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy, 98*(5, Part 2), S71–S102. https://doi.org/10.1086/261725

Sako, U., & Lantowa, F. D. (2018). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas penyajian laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science, 2*(1), 43–54. https://doi.org/10.21070/jas.v2i1.1101

Saputra, M. R., Haliah, & Indrijawati, A. (2021). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening. *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer, 14*(2), 129–134. https://doi.org/10.26487/akrual.v14i2.14810

Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Research methods for business: A skill-building approach* (8th ed.). John Wiley & Sons.

Smith, A. (2007). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. MetaLibri. (Original work published 1776).

Solow, R. M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. *The Quarterly Journal of Economics, 70*(1), 65–94. https://doi.org/10.2307/1884513

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2021). *Economic development* (13th ed.). Pearson.

Tuwo, R. D., Rotinsulu, D. C., & Kawung, G. M. V. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 21*(4). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/36445

Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory econometrics: A modern approach* (7th ed.). Cengage Learning.